



EQUALITY. JSI by IAI TABAH is licensed under a Creative Commons Attribution-Non Commercial 4.0 International License

Naskah masuk	Direvisi	Diterima	Diterbitkan
01-Nov-2024	01-Des-2024	13-Des-2024	30-Des-2024
DOI : https://doi.org/10.58518/equality.v2i2.3335			

Pendidikan Inklusif Gender: Analisis Pemikiran RA Kartini

Khoriadatul Azizah

Institut Agama Islam Tarbiyatut Tholabah, Lamongan, Indonesia

Khorida.azizah429@gmail.com

Nailur Rosyida

Institut Agama Islam Tarbiyatut Tholabah, Lamongan, Indonesia

rosyidanailur@gmail.com

ABSTRAK: Dalam kehidupan sosial masyarakat Muslim, terdapat ketimpangan gender yang bertentangan dengan ajaran Islam yang mengutamakan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan. Ketidaksetaraan ini sering kali dijustifikasi dengan penafsiran agama yang salah, sehingga diperlukan perubahan budaya dan struktural untuk mengubah pandangan pendidikan Islam agar mencapai kesetaraan gender. Pendidikan gender memiliki tujuan menciptakan keadilan dan harmoni antara sesama jenis individu, didasarkan pada kesenjangan yang ada di antara keduanya. Penelitian ini dimaksudkan untuk menginvestigasi konsep pendidikan yang mempertimbangkan perbedaan gender dan sejauh mana hal tersebut relevan dengan tujuan pendidikan Islam. Metode penelitian ini memakai analisis kualitatif dengan pendekatan kepustakaan, melibatkan pengumpulan berbagai dokumen seperti buku, artikel, jurnal, dan dokumen lainnya. Sumber data penelitian terdiri dari data utama dan data pendukung. Temuan penelitian ini mengindikasikan adanya kesamaan konseptual antara pendidikan inklusif gender dan tujuan pendidikan Islam, terutama dalam hal pendidikan yang wajib bagi laki-laki dan perempuan serta penekanan pada pengembangan akhlak. Melalui pendidikan ini, diharapkan laki-laki dan perempuan dapat bekerja sama untuk kemajuan bangsa, sesuai dengan pemikiran RA Kartini.

Kata Kunci: Pendidikan inklusif gender, Tujuan Pendidikan Islam, RA Kartini

ABSTRACT: *In the social life of Muslim societies, there are gender inequalities that contradict Islamic teachings that prioritise equality between men and women. This inequality is often justified by incorrect religious interpretations, so cultural and structural changes are needed to change the view of Islamic education to achieve gender equality. Gender education has the goal of creating justice and harmony between different*

types of individuals, based on the disparities that exist between them. This research is intended to investigate the concept of education that considers gender differences and the extent to which it is relevant to the goals of Islamic education. The research method uses qualitative analysis with a literature approach, involving the collection of various documents such as books, articles, journals, and other documents. The research data sources consist of main data and supporting data. The findings of this research indicate that there are conceptual similarities between gender-inclusive education and the goals of Islamic education, especially in terms of education that is mandatory for both men and women and emphasis on moral development. Through this education, it is expected that men and women can work together for the progress of the nation, in accordance with the thoughts of RA Kartini.

Keywords: *Gender inclusive education, Islamic education goals, RA Kartini*

PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan suatu kebutuhan pokok yang harus dipenuhi oleh setiap individu karena berperan sebagai faktor utama dalam upaya meningkatkan kualitas kehidupan (Jumyati. et al., 2022). Untuk itu, setiap individu mempunyai hak yang tidak dapat disangkal untuk mendapatkan pendidikan yang dijamin oleh Pasal 31 ayat 1 UUD 1945 untuk memperoleh pendidikan. Pendidikan yang diperoleh seseorang memiliki peran penting dalam membentuk dan mempengaruhi perjalanan hidupnya serta mencapai masa depan yang diinginkan. Semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang, semakin memahami realitas dan lebih mampu mengatasi masalah, sehingga dapat menjalani hidup dengan lebih mudah (Saihu, 2019).

Kedatangan pengaruh Islam juga mengubah pola dan sistem pendidikan yang telah berlangsung lama di Hindia-Belanda. Pendidikan pada masa Hindu-Budha awalnya sangat eksklusif dan ditujukan hanya untuk kalangan bangsawan guna melegitimasi kekuasaan Raja. Namun, pendidikan tersebut kemudian berubah menjadi pendidikan untuk seluruh masyarakat dengan tetap mengikuti pola pendidikan padepokan yang sudah ada sejak masa Hindu-Budha, dan berkembang menjadi sistem pesantren (Pramudawardhani & Estiana, 2019). Di Indonesia pada masa penjajahan Belanda, penyelenggaraan pendidikan baru muncul pada abad ke-18 M, tepatnya pada tahun 1848. Gubernur Jenderal Van den Bosch memberikan subsidi untuk pendirian lembaga pendidikan bagi penduduk pribumi di Jawa yang mengadopsi model pendidikan Barat. Sekolah-sekolah yang didirikan umumnya ditujukan bagi anak-anak tokoh terkemuka dan bangsawan (Zaini et al., n.d.)

Pada awal abad ke-20, RA Kartini, seorang tokoh pemikir dan revolusioner dalam bidang pendidikan, muncul dari kalangan bangsawan setempat. Kartini merasakan kegelisahan di dalam dirinya karena merasakan keterbelakangan, keterbatasan dalam mencapai cita-citanya, kekurangan kasih sayang, dan pembatasan yang diimpose oleh adat dan budaya feodal yang semakin membatasi

kemajuan bangsanya sendiri. Dia menyadari bahwa keterbelakangan yang dialami perempuan Indonesia saat itu disebabkan oleh sistem feodalisme, di mana laki-laki memiliki keunggulan yang dominan, sementara hak, kewajiban, dan martabat perempuan terpinggirkan dengan peran yang terbatas hanya pada urusan rumah tangga (MD & Hudaidah, 2021). Sebagai seorang Muslim yang taat, Kartini menghadapi keyakinan tersebut dengan sikap kritis. Dia percaya bahwa setiap manusia dilahirkan dengan akal budi, Setiap orang memiliki hak yang sama dalam hal hak asasi, tanpa memandang perbedaan status sosial, dan tidak ada ketimpangan antara laki-laki dan perempuan. Kartini kemudian mengusulkan perubahan besar untuk memperjuangkan kebangkitan perempuan Indonesia (Hartutik, 2015).

Idealisme suci tumbuh dalam diri RA Kartini karena pendidikan yang dia terima dan interaksinya dengan masyarakat yang menunjukkan kemajuan peradaban barat, dan perbedaan tersebut dengan tingkat peradaban masyarakat Indonesia di berbagai daerah yang masih terbelakang (Hartutik, 2015). Kartini, sebagai pelopor sejarah Indonesia modern, menolak pemisahan dalam pendidikan yang menghalangi perempuan untuk melanjutkan pendidikan tinggi. Dia meyakini dengan sungguh-sungguh bahwa pendidikan tidak hanya laki-laki, tetapi juga perempuan memiliki kepentingan yang sama. Pandangan ini sejalan dengan hadits Rasulullah SAW (Al-Qazwini et al., 2016) yang menyatakan bahwa "Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim, baik laki-laki maupun perempuan". Argumentasi ini menunjukkan bahwa upaya Kartini untuk kemajuan bangsa sangat tepat. Langkah yang diambilnya untuk mendidik perempuan, yang pada saat itu dianggap kurang beruntung dan terpinggirkan, merupakan upaya untuk meningkatkan status masyarakat Indonesia di mata dunia. Setelah masuknya Islam di Indonesia, ajaran agama ini secara perlahan menghapus dan mengubah sistem kasta yang dipegang oleh banyak masyarakat adat, sehingga menciptakan kesatuan. Namun, prinsip kasta ini tetap ada dan akan menjadi acuan dalam interaksi antarmasyarakat di masa sekarang dan mendatang (Saputri et al., 2022).

Saat ini, sistem pendidikan mengalami perubahan prinsip-prinsip sosial dan budaya yang secara sadar ataupun tidak sadar mencerminkan ketidaksetaraan gender atau ketidakseimbangan dalam pembagian peran antara laki-laki dan perempuan (Aviyani et al., 2022). Kejadian kekerasan seksual dan perkosaan juga sering terjadi di lingkungan pendidikan, di mana korban sering kali menghadapi pelecehan, stigmatisasi, dan diskriminasi akibat narasi yang didominasi oleh patriarki. Sebaliknya, daripada mendapatkan dukungan hukum, korban malah semakin terabaikan karena tekanan mental yang mereka alami. Oleh karena itu, penting bagi negara untuk memberikan prioritas pada legislasi yang mendukung korban (Mayasari, 2022). Budaya yang mementingkan perbedaan gender dapat terus berkembang di masyarakat melalui proses ersepsi gender dapat terus berkembang di masyarakat melalui proses pewarisan dari satu generasi ke generasi berikutnya (Abidin, 2008; Saputri et al., 2022). Oleh karena itu, diperlukan usaha untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya kesetaraan dan keadilan gender sebagai elemen

krusial dalam membentuk masyarakat yang adil dan setara, di mana kesetaraan ada dalam dimensi agama, politik, ekonomi, sosial, dan budaya.

Umumnya, masyarakat cenderung memposisikan perempuan dalam posisi yang lebih rendah dibandingkan dengan laki-laki, yang sering disebut dengan subordinasi. Perempuan tidak memiliki kontrol penuh atas kehidupan mereka sendiri (Aviyani et al., 2022). Peran klasik perempuan secara turun temurun terbatas pada urusan domestik, sementara laki-laki dianggap hanya memiliki tanggung jawab sebagai pencari nafkah tanpa tugas ganda di dalam rumah. Akibatnya, selain mengalami subordinasi terhadap laki-laki, perempuan juga menghadapi beban ganda jika mereka memilih untuk berkarir dan tetap mengurus urusan domestik (Saeful, 2019). Doktrin ini menghasilkan situasi di mana perempuan tidak memiliki kebebasan untuk menyuarakan pengalaman mereka. Kondisi seperti ini telah lama menimpa mayoritas perempuan di Indonesia, di mana kehidupan perempuan diatur secara ketat mirip budak yang tunduk pada tuannya (Rusydiah, 2016).

Namun, di sisi lain, para laki-laki yang telah mendapatkan kesempatan pendidikan di lembaga pendidikan Belanda tidak diajarkan nilai-nilai pembentukan karakter dan jiwa yang dapat mengarahkan mereka untuk mengubah Indonesia agar bebas dari penjajahan Belanda. Seandainya mereka diberikan pendidikan yang mengutamakan budi pekerti yang luhur, mereka akan menyadari ketertinggalan perempuan dan memiliki niat baik untuk bersama-sama meningkatkan pendidikan masyarakat demi kemajuan Indonesia yang melampaui dominasi Belanda (Saeful, 2019). Meskipun Kartini tidak memiliki pendidikan tinggi, pengetahuannya tentang emansipasi wanita semakin kuat. Ia tetap berusaha belajar dan menambah pengetahuan melalui membaca dan menulis. Kartini percaya bahwa perempuan harus mendapatkan pendidikan tinggi karena perempuan memiliki peran penting sebagai pendidik utama bagi anak-anak di lingkungan rumah. Untuk itu, perempuan harus memiliki pengetahuan yang memadai untuk melaksanakan tugas pendidikan anak-anak mereka (Hermawan et al., 2021; MD & Hudaidah, 2021).

Pada masa kini, dalam konteks pendidikan, terjadi pergeseran dalam nilai-nilai sosial dan budaya yang secara sengaja atau tanpa disadari telah menciptakan standar penilaian berdasarkan jenis kelamin, yang dikenal sebagai ketidakadilan gender atau kesenjangan peran antara laki-laki dan perempuan, yang sering disebut sebagai subordinasi (Fakih, 2013; Kiram, 2020). Oleh karenanya, penting melakukan upaya yang bertujuan mengembangkan pemahaman dan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya kesetaraan dan keadilan gender sebagai faktor kunci dalam membentuk masyarakat yang setara dan adil, di mana kesetaraan gender diterapkan dalam dimensi agama, politik, ekonomi, sosial, dan budaya (MD & Hudaidah, 2021).

Meskipun telah dilakukan upaya untuk mencapai pemerataan hak dan kewajiban antara laki-laki dan perempuan sejak abad ke-20 oleh RA Kartini, data yang tersedia pada tahun 2019 menunjukkan bahwa masih terdapat perbedaan yang signifikan di beberapa daerah di Jawa Timur. Berdasarkan Data Pokok

Pendidikan Kemendikbud, kota Surabaya menempati peringkat pertama di antara 38 kota di Jawa Timur, dengan persentase anak laki-laki yang bersekolah dalam jenjang usia 7-12 tahun lebih banyak sebanyak 0,06 dibandingkan dengan anak perempuan. Selanjutnya, berdasarkan data Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur dalam dua tahun terakhir, secara umum jumlah anak laki-laki dan perempuan dalam jenjang usia 7-24 tahun yang masih bersekolah di Jawa Timur menunjukkan keunggulan 0,35 bagi anak perempuan (Statistik, 2022).

Dari data tersebut, terlihat adanya kemungkinan bahwa sektor lain juga memberikan akses pekerjaan yang lebih terbuka bagi perempuan. Posisi atau jabatan yang sebelumnya dianggap sebagai hak mutlak bagi laki-laki sekarang dapat diduduki oleh perempuan. Contohnya, dalam sektor pemerintahan di Jawa Timur, Kohfifah Indar Parawansa terpilih sebagai Gubernur Jawa Timur pada tahun 2019 dan sebelumnya menjabat sebagai Menteri Sosial pada tahun 2014. Selain itu, Wali Kota Surabaya tahun 2020 dijabat oleh Tri Rismaharini, yang kemudian juga menjadi Menteri Sosial. Peningkatan peran perempuan juga telah diupayakan melalui Undang-Undang No. 10/2008 tentang Partai Politik, yang mengamanatkan kuota 30% bagi perempuan dalam parlemen (*UU RI No. 10 Tentang Partai Politik*, n.d.).

Memang benar, meskipun telah ada peningkatan dalam partisipasi perempuan dalam berbagai posisi dan jabatan, proporsi tersebut masih lebih rendah dibandingkan dengan jumlah kuota yang ditetapkan untuk laki-laki. Hal ini tercermin dalam laporan *Global Gender Gap Report 2021* yang diterbitkan oleh World Economic Forum (WEF), di mana Indonesia berada pada tingkat ke-13 dari negara-negara anggota Group of Twenty (G20) dan peringkat ke-101 dari 156 negara yang disurvei oleh WEF, mengenai kesenjangan antara laki-laki dan perempuan (Ahdiat, 2022).

Jika pembahasan seputar RA Kartini hanya berfokus pada analisis tentang perjuangan untuk kesetaraan pendidikan antara laki-laki dan perempuan pada abad ke-19 dan ke-20, maka perlu juga membahas masalah diskriminasi yang masih ada antara laki-laki dan perempuan pada zaman sekarang yang menjadi isu sensitif dalam kehidupan masyarakat di Indonesia. Peneliti dapat mengkaji korelasi antara hal tersebut dengan tujuan pendidikan Islam. Karena alasan itu, para peneliti tertarik untuk menginvestigasi relevansi Pendidikan Inklusif Gender dengan tujuan pendidikan Islam melalui analisis pemikiran RA Kartini.

METODE

Penelitian ini mengadopsi pendekatan deskriptif kualitatif, yang berfokus pada analisis kata-kata tertulis. Prosedur penelitian lebih menekankan pada pemahaman makna, penalaran, dan definisi situasi yang terkait dengan kehidupan sehari-hari (Miles, 2014). Penelitian dengan studi kepustakaan (*library research*), yang memerlukan akses ke berbagai dokumen seperti buku, artikel, jurnal, dan dokumen lainnya. Data penelitian ini terdiri dari sumber data utama (*data primer*) dan sumber data tambahan (*data sekunder*) yang digunakan sebagai pendukung. Literatur-literatur tersebut meliputi buku, jurnal, hasil penelitian,

surat kabar, hasil seminar, dan lain sebagainya yang relevan dengan relevansi pendidika gender dengan tujuan pendidikan Islam perspektif RA Kartini).

Dalam penelitian kepustakaan ini, peneliti bertujuan untuk membaca, menganalisis, dan menyelidiki tentang pendidikan berbasis gender perspektif RA Kartini dan relevansinya terhadap tujuan pendidikan Islam. Metode pengumpulan data yang diterapkan adalah metode dokumentasi, di mana data yang telah terkumpul akan melalui tahap analisis data. Teknik analisis data dengan reduksi data, di mana peneliti akan memilah data yang relevan, fokus pada inti permasalahan, dan kemudian menyajikan data dalam bentuk deskripsi melalui proses penyajian data. Tahap terakhir adalah penarikan kesimpulan atau verifikasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pendidikan Inklusif Gender Pemikiran RA Kartini

Pemikiran RA Kartini kuat dalam mendorong pendidikan inklusif gender. Sebagai seorang pahlawan nasional Indonesia yang berjuang untuk emansipasi perempuan dan kesetaraan gender, Kartini menekankan pentingnya memberikan kesempatan pendidikan yang setara bagi perempuan dan laki-laki serta menghapuskan batasan-batasan sosial yang menghambat perkembangan perempuan. Kartini menyadari bahwa pendidikan adalah kunci untuk membebaskan perempuan dari keterbelakangan dan ketergantungan (Nurdiansyah et al., 2021). Ia berpendapat bahwa perempuan memiliki hak yang sama untuk mendapatkan pendidikan berkualitas dan mengembangkan potensi mereka sepenuhnya. Melalui pendidikan inklusif gender, Kartini bertujuan untuk mengatasi ketidakadilan gender dalam akses pendidikan dan membangun kesadaran akan kesetaraan gender dalam masyarakat (Syarif et al., 2023).

Pemikiran Kartini juga menekankan pentingnya pendidikan sebagai sarana untuk mengubah paradigma dan norma sosial yang tidak adil terhadap perempuan. Ia menyadari bahwa pendidikan inklusif gender tidak hanya bermanfaat untuk kemajuan perempuan, tetapi juga untuk mencapai kesetaraan gender secara luas dalam masyarakat. Bagi Kartini, pendidikan inklusif gender memberikan kesempatan kepada perempuan untuk mengembangkan potensi, memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman yang setara dengan laki-laki. Hal ini akan membantu menciptakan masyarakat yang lebih adil, setara, dan berkembang secara holistic (Nurdiansyah et al., 2021).

Pemikiran Kartini tentang pendidikan inklusif gender tetap relevan hingga saat ini dan menjadi inspirasi dalam perjuangan untuk kesetaraan gender dan pendidikan inklusif di berbagai belahan dunia. Pendidikan kesetaraan berdasarkan pemikiran RA Kartini, mencakup pendidikan kesetaraan dan pendidika budi pekerti, dapat dijelaskan sebagai berikut:

Pendidikan Kesetaraan

Laki-laki dan perempuan adalah makhluk yang sama-sama diciptakan

oleh Allah SWT dengan status yang setara, sehingga tidak ada struktur hierarki atau sistem kasta dalam menentukan kedudukan manusia. Allah SWT menciptakan berbagai makhluk, namun manusia memiliki keistimewaan karena dianugerahi akal sebagai pembeda dari ciptaan-Nya yang lain. Manusia dibentuk dalam dua jenis kelamin, yakni laki-laki dan perempuan, oleh kehendak Allah SWT.

Allah SWT menyampaikan dalam ayat ke-13 surat al-Hujurat (*Quran Kemenag, n.d.*):

“Wahai manusia, sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian, Kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Mahateliti”.

Allah SWT menciptakan laki-laki dan perempuan dengan keragaman etnis, suku, warna kulit, dan bentuk fisik yang berbeda. Keragaman ini seharusnya tidak menjadi dasar untuk saling membanggakan atau merendahkan sesama manusia.

Tidak seharusnya gender dijadikan sebagai penentu tingkat sosial dalam masyarakat. Negara telah mengakui pentingnya kesetaraan gender dan mencantulkannya di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pengarus Utamaan Gender (PUG), terdapat definisi yang tercantum dalam Pasal 1 Bagian Pertama dari peraturan tersebut menyatakan bahwa laki-laki dan perempuan memiliki hak yang setara sebagai makhluk manusia, termasuk hak berpartisipasi dan berperan dalam bidang politik, ekonomi, sosial-budaya, pertahanan, dan keamanan, serta hak yang sama dalam menikmati hasil dari proses pembangunan (*Permendagri_No, n.d.*). Gender sendiri merupakan produk dari pembentukan sosial budaya yang terus berubah dan dapat dipelajari, dan perlu dicatat bahwa gender dapat mengalami perubahan seiring waktu atau beralih dari satu budaya ke budaya lainnya (Udzma et al., 2023). Keadilan gender merupakan proses untuk menciptakan kesetaraan dalam perlakuan terhadap laki-laki dan perempuan. Untuk mencapai keadilan tersebut, penting untuk menyamakan kondisi antara laki-laki dan perempuan memiliki kesempatan yang sama dalam memperoleh hak-hak sebagai individu, yang memungkinkan mereka untuk berkontribusi dan berpartisipasi secara seimbang dalam berbagai bidang seperti politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan, dan keamanan serta menikmati hasil pembangunan dengan sama-sama.

Pencantuman dalam peraturan bertujuan untuk menghapus sistem kasta yang tidak tertulis yang masih ada dalam masyarakat, sehingga tidak ada pihak yang mengalami ketimpangan dalam segala hal yang berhubungan dengan kemanusiaan (Chaerunnisa, 2023). Dalam konteks pendidikan, diharapkan tidak ada diskriminasi terhadap peserta didik berdasarkan latar belakang keluarga mereka. Pendekatan gender dalam pendidikan bertujuan untuk mendidik peserta didik dengan memperlakukan mereka dengan harmonisasi seperti mendidik anak sendiri (Amanah et al., 2023).

Pengamalan keadilan dan kesetaraan gender penting karena RA Kartini telah memahami bahwa gender terbentuk melalui proses sosial dan budaya yang ada sejak zaman nenek moyang, termasuk dalam aturan-aturan atau hukum-hukum tidak tertulis yang dikenal sebagai adat (Amanah et al., 2023). Pemerintah berusaha menyadarkan masyarakat akan makna gender secara nasional. Hal ini bertujuan agar hubungan kemanusiaan terhubung secara vertikal, di mana laki-laki tidak berada pada posisi yang lebih tinggi dan memegang kekuasaan tertinggi atas perempuan (Sumayyah Hilyatul A. et al., 2023).

Dalam bidang pendidikan, penting bagi pendidik untuk memahami esensi gender dengan baik, sehingga dalam kegiatan belajar mengajar dapat mengurangi bias gender. Pendidikan memiliki peran yang efektif dalam mentransfer pemahaman tentang gender kepada peserta didik, sehingga bias gender dapat diminimalisir di Indonesia (Pancaningrum, 2023). Pendidikan diwajibkan untuk diberikan pada laki-laki dan perempuan, dari tingkat pendidikan dasar hingga tingkat pendidikan tinggi. Hal ini sesuai dengan ajaran Hadis Rasulullah SAW yang menyatakan "Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim laki-laki dan perempuan" (*Ibnu Majah 220*, n.d.). Dalam hadis tersebut, tidak ada lagi pengecualian terhadap perempuan untuk mendapatkan kesempatan pendidikan yang sama dengan laki-laki seperti yang terjadi di masa RA Kartini. Saat ini, pendidikan telah disediakan oleh pemerintah sehingga baik laki-laki maupun perempuan dari berbagai daerah di Indonesia dapat mengakses pendidikan di sekolah negeri dan swasta (Qosyasih et al., 2023).

Tertulis dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia pada Pasal 48 menyatakan bahwa perempuan memiliki hak mendapatkan pendidikan di segala jenis, tingkatan, dan jalur pendidikan (Undang Undang RI, n.d.), sesuai dengan ketentuan yang telah diatur dalam Pasal 60 ayat 1 yang menyebutkan bahwa setiap anak memiliki hak mendapatkan pendidikan untuk pengembangan diri sesuai dengan minat, bakat, dan potensi intelektual yang dimiliki (Undang Undang RI, n.d.-c). Di samping itu, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pada Pasal 4 menyatakan bahwa pendidikan yang diinginkan oleh masyarakat Indonesia harus diselenggarakan dalam cara yang demokratis, adil, dan tanpa diskriminasi, dengan menghormati hak asasi manusia, nilai-nilai keagamaan, nilai-nilai budaya, dan keragaman etnis (Undang Undang RI, n.d.-a). Agama Islam juga mendukung umat manusia untuk mendapatkan pendidikan sepanjang hidup mereka, mulai dari lahir hingga akhir hayat (Qosyasih et al., 2023).

Pendidikan Budi Pekerti

Dalam penelitian mengenai pemikiran RA Kartini, terdapat dua pemikiran yang ditemukan. Pemikiran pertama adalah inklusi pendidikan akhlak dalam kurikulum sekolah. RA Kartini telah menerapkan kurikulum ini di sekolah perempuan yang ia dirikan (Pramudawardhani & Estiana, 2019). Tujuannya adalah untuk memberikan pendidikan yang mencerdaskan dan membentuk karakter peserta didik agar menjadi individu yang berbudi pekerti baik dan

berakhlak karimah. Pemikiran ini sejalan dengan pandangan Ki Hajar Dewantara, yang mengatakan bahwa pendidikan harus mendorong perkembangan moral, intelektual, dan fisik peserta didik (Nainggolan, Yuni Martha, 2012). Pendekatan ini bertujuan untuk mencapai keseimbangan antara dimensi kognitif, afektif, dan psikomotorik pada peserta didik. Pendidikan dianggap sebagai upaya terbaik dalam membina potensi intelektual, spiritual, dan fisik manusia sehingga mereka memiliki pengetahuan, akhlak, dan kemampuan yang diperlukan untuk melaksanakan tugas sebagai khalifah.

Pemikiran kedua yang diperoleh dari penelitian tentang RA Kartini adalah bahwa tenaga pendidik memiliki tanggung jawab dalam mengembangkan aspek intelektual dan moral peserta didik. Seperti yang dikutip oleh Muhibbin dari Poerbakawatja dan Harahap, pendidikan merupakan upaya yang disengaja yang diberikan oleh orang tua atau orang dewasa kepada anak-anak guna mengembangkan tanggung jawab moral atas segala tindakan yang dilakukan oleh anak (Tulillah, 2023). Oleh karena itu, tugas pendidik tidak hanya sebatas mengembangkan pemikiran, tetapi juga harus menjaga pembentukan karakter dan budi pekerti.

Selanjutnya, pemikiran ketiga adalah bahwa manusia yang memiliki akhlak mulia akan membantu kemajuan bangsa. Seperti yang disampaikan oleh Abbas Mahjub, pembentukan akhlak yang baik akan membawa kemajuan dalam kehidupan manusia (Harisah, 2018). Kemajuan suatu bangsa dipengaruhi oleh dua faktor utama, yaitu kemajuan dalam bidang peradaban dan kemajuan dalam aspek sosial. Kemajuan peradaban terwujud ketika manusia memiliki pengetahuan dan teknologi yang memadai. Namun, kemajuan sosial dapat dicapai ketika manusia juga memiliki moralitas yang baik dan berakhlak mulia (Aniroh, Fathurohim, 2022).

Dalam konteks ini, penting untuk menegaskan bahwa pendidik mempunyai peran yang sangat penting dalam membentuk karakter dan kepribadian peserta didik di sekolah. Mereka juga memiliki tanggung jawab untuk mengawasi dan membantu peserta didik dalam mengembangkan budi pekerti yang mulia di mana pun mereka berada. Sebagai tokoh sentral, pendidik secara langsung menjadi panutan bagi peserta didiknya (Estiana et al., 2022). Oleh karena itu, pendidik diharapkan memberikan teladan yang baik, sebagaimana yang telah ditunjukkan oleh Rasulullah SAW.

Tujuan Pendidikan Islam Inklusif Gender

Pendidikan Islam mengakui hakikat manusia sebagai subjek dan objek pendidikan. Menurut Jalaluddin, manusia, seperti halnya alam semesta, adalah ciptaan Tuhan yang memiliki unsur laki-laki dan perempuan. Tujuan penciptaan manusia adalah agar mereka dapat mengabdikan diri kepada Penciptanya. Dalam hal ini, manusia diberikan berbagai potensi baik dalam dimensi jasmani maupun rohani (Los, 2016). Pembagian potensi ini tidak bergantung pada jenis kelamin. Sebagai manusia, baik laki-laki maupun perempuan memiliki kesempatan yang sama untuk mengembangkan potensi diri dan sumber daya manusia yang

dimilikinya. Pendidikan sebagai sarana transformasi memainkan peran penting dalam menumbuhkan dan mengembangkan nilai-nilai kemanusiaan dan keilahian pada individu yang belajar serta masyarakat secara keseluruhan. Dalam konteks ini, pendidikan yang dimaksud adalah pendidikan berbasis Islam. Pendidikan ini mencoba memberikan ruang yang cukup untuk dogma agama dalam mengatasi berbagai tantangan zaman yang dihadapi (Yumnah, 2021).

Pendidikan Islam berbasis gender memiliki tujuan untuk menghasilkan individu laki-laki dan perempuan yang memiliki akhlak yang mulia (akhlakul karimah) sehingga dapat memberikan manfaat bagi kehidupan. Dalam ajaran Islam, semua manusia tanpa terkecuali diwajibkan untuk mencari ilmu dengan mengikuti proses pendidikan yang melibatkan pembentukan aspek jasmani dan rohani. Pendidikan dianggap sebagai suatu tempat di mana individu dapat memperoleh pengetahuan dan pengembangan diri secara holistik (Wahyuni et al., 2020).

Sejalan dengan perintah Rasulullah SAW *"Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim laki-laki dan perempuan"* (Ibnu Majah 220, n.d.). Dalam Islam, semua manusia diwajibkan untuk mencari ilmu dengan mengikuti proses pendidikan yang melibatkan pembentukan aspek jasmani dan rohani. Pendidikan dalam konteks Islam memiliki tujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi makhluk yang beriman, berilmu, dan berakhlakul karimah (Umami, 2020). Dengan memiliki akhlak yang baik, manusia akan lebih mampu menjalankan tugasnya di dunia. Manusia dipandang sebagai khalifah Allah SWT di bumi, yang bertanggung jawab atas kehidupan di dunia. Oleh karena itu, pendidikan diperlukan untuk memberikan manusia pengetahuan dan akhlak mulia guna meningkatkan kualitas kehidupan. Hal ini didasari oleh firman Allah SWT dalam surat al-Baqarah ayat 30, Allah SWT berfirman (Quran Kemenag, n.d.):

"(Ingatlah) ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, "Aku hendak menjadikan khalifah di bumi." Mereka berkata, "Apakah Engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih memuji-Mu dan menyucikan nama-Mu?" Dia berfirman, "Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui."

Sebagai khalifah dan wakil dari Allah SWT, manusia memiliki tanggung jawab besar dalam kehidupan di dunia. Untuk itu, pendidikan menjadi penting guna membekali manusia dengan kecerdasan dan akhlak mulia yang diperlukan untuk meningkatkan kualitas kehidupan (Umami, 2020). Pendidikan memainkan peran penting dalam membentuk manusia menjadi individu yang berintegritas, memiliki pengetahuan yang luas, dan bertindak dengan akhlak yang baik. Dengan adanya pendidikan yang mendorong kecerdasan dan akhlak mulia, manusia dapat mengembangkan potensi diri secara optimal dan menjalankan tugasnya sebagai khalifah dengan baik, menghormati hak-hak sesama manusia, dan berkontribusi positif bagi kehidupan di dunia.

Pentingnya memperhatikan kesadaran dan pemahaman tentang isu-isu gender, baik pendidik maupun peserta didik akan dapat mengubah pandangan yang telah mengakar dalam konteks budaya yang patriarkal, dan seringkali

merendahkan partisipasi perempuan dalam masyarakat dan ruang publik (Umami, 2020). Dengan adanya pengembangan adanya kesadaran dan pemahaman yang lebih tinggi tentang isu-isu gender, baik oleh pendidik maupun peserta didik, akan menjadi lebih memungkinkan untuk mengubah persepsi masyarakat yang telah lama tertanam dalam budaya patriarki dan seringkali mengabaikan peran perempuan. Terutama dalam konteks kepemimpinan, persepsi yang menganggap bahwa Pandangan bahwa perempuan tidak pantas menjadi pemimpin perlu diubah melalui pembelajaran pendidikan agama Islam yang menerapkan konsep kesetaraan gender. Hal ini akan membantu peserta didik perempuan menjadi lebih berani dan optimis dalam mengejar cita-cita dan keinginan mereka untuk menjadi pemimpin (Umami, 2020).

Dengan demikian, pentingnya mengintegrasikan tujuan dari inklusi gender dalam pendidikan agama Islam adalah untuk mengurangi perlakuan tidak adil terhadap peserta didik perempuan dan untuk mengubah pandangan masyarakat yang telah lama terjebak dalam pola pikir patriarki yang merendahkan peran perempuan. Pembelajaran pendidikan agama Islam yang mendorong persamaan hak antara gender akan memberikan dorongan bagi peserta didik perempuan untuk meraih cita-cita dan keinginan mereka menjadi pemimpin dengan lebih berani dan optimis.

Relevansi Pendidikan Inklusif Gender dengan Tujuan Pendidikan Islam Pemikiran RA Kartini

Gagasan RA Kartini mengenai pendidikan yang memperhatikan perbedaan gender sejalan dengan tujuan pendidikan dalam Islam. Di antara gagasan utama yang diungkapkan oleh RA Kartini dalam upaya memajukan bangsanya adalah pendidikan yang mementingkan kesetaraan. RA Kartini berjuang untuk melawan demi hak dan tanggung jawab yang sama bagi penduduk pribumi, termasuk dalam bidang pendidikan. Hal ini memiliki keterkaitan dengan ajaran Rasulullah SAW yang menjadi dasar tujuan pendidikan Islam. Tujuan pendidikan Islam adalah memberikan kesempatan yang setara kepada individu berbasis gender dalam mendapatkan pendidikan. Prinsip ini mencakup upaya untuk menghilangkan diskriminasi gender dan memberikan hak yang sama pada setiap individu dalam hal pendidikan. Ajaran Rasulullah SAW dalam hadis-hadisnya menekankan pentingnya mencari ilmu bagi semua individu tanpa memandang jenis kelamin. Dengan demikian, terdapat kesesuaian antara konsep pendidikan berbasis gender yang diusulkan oleh RA Kartini dan tujuan pendidikan Islam. Keduanya mengedepankan pendekatan yang adil dan setara dalam memberikan kesempatan pendidikan kepada individu, termasuk perempuan, sebagai bagian dari upaya memajukan bangsa dan masyarakat. Hadis tersebut berbunyi "*Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim laki-laki dan perempuan*" (Ibnu Majah 220, n.d.). Dalam pandangan al-Attas, keadilan harus ditegakkan untuk semua manusia, di mana segala sesuatu harus terbagi secara adil dan seimbang sesuai dengan porsi masing-masing. Prinsip keadilan ini mencakup berbagai aspek kehidupan, termasuk pendidikan. Dalam konteks

pendidikan, keadilan berarti memberikan kesempatan yang setara bagi setiap individu untuk mengembangkan potensi mereka tanpa adanya diskriminasi atau ketidakadilan (Daud, 2003).

Dalam rangka mewujudkan keadilan, manusia telah diberikan petunjuk dalam ayat-ayat yang diturunkan oleh Allah SWT. Seperti yang disebutkan dalam Surat al-Hujurat (49):13, Allah berfirman:

“Wahai manusia, sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian, Kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Mahateliti” (Quran Kemenag, n.d.).

Ayat tersebut memberikan panduan bagi manusia untuk mempertimbangkan kembali cara mereka mengelompokkan masyarakat berdasarkan berbedanya jenis kelamin, warna kulit, dan perbedaan ekonomi. Hanya Allah SWT sebagai pencipta yang berhak menilai kepribadian manusia. Allah SWT menciptakan segala sesuatu dengan perbedaan-perbedaan tersebut agar manusia dapat bersyukur, bertasbih, takjub, dan mengingat kekuasaan-Nya dalam menciptakan segala sesuatu.

Namun, pengetahuan tentang keadilan ini tidak akan diketahui oleh manusia jika tidak ada usaha untuk mencapainya. Allah SWT menurunkan Al-Quran sebagai sumber ilmu pengetahuan yang menjadi dasar bagi manusia. Ilmu pengetahuan mengenai Al-Quran diibaratkan sebagai makanan lezat dalam jamuan keruhanian oleh al-Attas (Daud, 2003). Oleh karena itu, dalam mempelajari ilmu pengetahuan yang berasal dari Al-Quran, manusia seharusnya memperhatikan perilaku yang sesuai dengan kemuliaan ilmu yang dipelajari, dengan menggunakan sikap dan etiket yang suci.

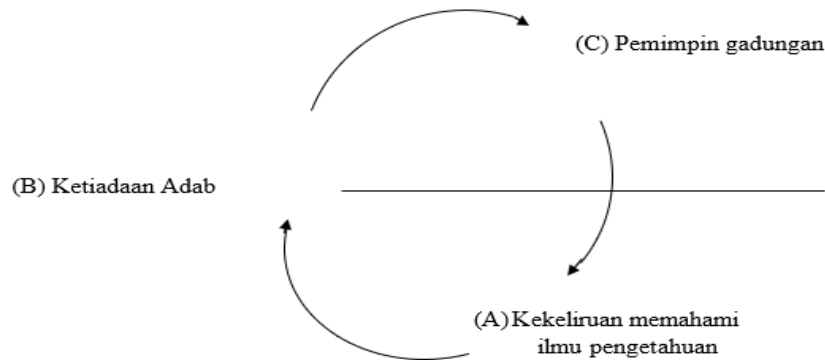
Dalam mempelajari ilmu pengetahuan mengenai Al-Quran, penting untuk semua individu, termasuk laki-laki maupun perempuan, untuk memahaminya secara seragam. Hal ini disebabkan karena jika pemahaman tersebut tidak seragam, maka akan terjadi kepincangan dalam pemahaman tersebut (Chaerunnisa, 2023). Oleh karena itu, baik laki-laki maupun perempuan perlu mendapatkan pendidikan yang sesuai dan tepat. Selain itu, penting juga untuk mencatat bahwa jika hanya satu kelompok dalam masyarakat yang mendapatkan akses pendidikan, baik itu lapisan atas maupun lapisan bawah yang dibedakan secara tradisional, maka akan terjadi ketimpangan dan kepincangan dalam masyarakat (Pancaningrum, 2023). Oleh karena itu, diperlukan kebijakan dan program yang menyediakan akses pendidikan dan menerapkan praktik pembelajaran yang responsif terhadap gender guna mencapai kesetaraan gender secara umum. Dengan demikian, kebijakan pendidikan dan implementasi program yang memperhatikan kesetaraan gender dalam akses dan praktik pembelajaran sangat penting untuk mencapai kesetaraan gender yang lebih baik.

Gagasan utama yang dapat diambil dari pendidikan budi pekerti dalam pemikiran RA Kartini adalah pentingnya pendidikan akhlak sebagai landasan untuk kemajuan bangsa. Konsep ini sejalan dengan tujuan pendidikan Islam yang

dirumuskan oleh al-Abrasy, yang menunjukkan bahwa pendidikan Islam bertujuan untuk mencetak manusia dengan akhlak mulia, memberikan bekal untuk kehidupan di dunia dan akhirat, serta mengembangkan keterampilan mencari rizki, semangat, dan profesionalisme (Roqib, 2009). Pandangan Abbas Mahjub juga menambahkan bahwa kemajuan dalam kehidupan manusia dapat dicapai melalui pembentukan akhlak yang baik (Mahjub, 1987). Kedua pendapat ini saling mendukung dan menguatkan satu sama lain. Oleh karena itu, dapat ditarik kesimpulan bahwa pendidikan akhlak merupakan aspek penting dalam pembentukan karakter manusia dan juga mempunyai peran yang signifikan dalam kemajuan dan kualitas kehidupan. Keduanya menggarisbawahi pentingnya pendidikan yang bukan hanya fokus pada aspek intelektual, namun juga untuk pembentukan akhlak yang mulia..

Al-Attas juga mendukung pandangan para pakar ilmu di atas. Ia menekankan bahwa pendidikan Barat, dengan fokus utamanya pada pencapaian kebahagiaan materi, memiliki perbedaan dengan pendidikan Islam yang mendasarkan dirinya pada al-Quran. Islam hadir untuk memberikan ilmu pengetahuan yang, jika dipelajari dengan sungguh-sungguh dan pemahaman yang benar, akan membawa kebahagiaan baik secara materi maupun spiritual (Daud, 2003). Al-Attas berpendapat bahwa jika manusia hanya melihat ilmu sebagai cara untuk menghilangkan kebodohan semata, mereka hanya akan mencapai kebahagiaan duniawi. Namun, jika manusia mempelajari ilmu dengan tujuan yang lebih mendalam, mereka akan memperoleh kepuasan yang berkelanjutan dalam hal kebutuhan material dan spiritual. Al-Attas juga mencatat bahwa dalam konteks kehidupan saat ini, jika peserta didik dan orang tua terjebak dalam "penyakit diploma" yang hanya berfokus pada perolehan gelar pendidikan semata, maka tujuan pendidikan menjadi terdistorsi. Namun, jika manusia mempelajari ilmu dengan sungguh-sungguh untuk memahami esensi pengetahuan itu sendiri, mereka akan memenuhi kebutuhan material dan spiritualnya secara berkelanjutan.

Dalam situasi di mana muncul pemimpin, tokoh agama, dan orang-orang terpelajar seperti yang digambarkan oleh RA Kartini pada masa hidupnya, mereka telah menjalani pendidikan yang didasarkan pada model pendidikan Barat. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika pengetahuan yang mereka peroleh tidak mampu memberikan pencerahan pada jiwa dan pikiran mereka. Al-Attas menggambarkan kondisi seperti ini sebagai "kehilangan adab" (Daud, 2003). Al-Attas memberikan gambaran tentang rotasi yang terjadi akibat hilangnya adab sebagai berikut::

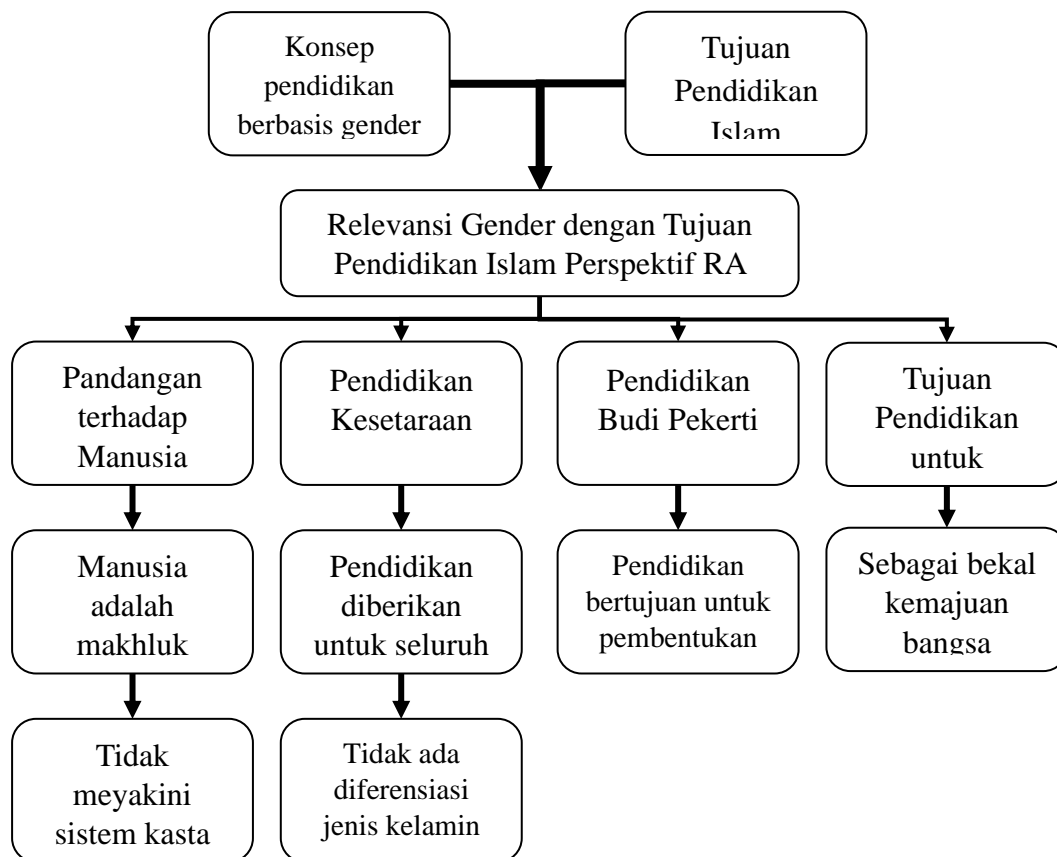


Gambar 1. Rotasi Hilangnya Adab

Para pemimpin yang kekurangan dalam memiliki moral yang tinggi dan keterbatasan dalam kemampuan intelektual dan spiritual yang memadai, sering mendominasi berbagai sektor seperti keagamaan, pendidikan, politik, dan ekonomi. Oleh karena itu, menurut al-Attas, yang perlu diperbaiki bukanlah aspek A, tetapi urgensi terletak pada aspek B (Daud, 2003). Hal ini karena pengetahuan dan ilmu pengetahuan tidak dapat ditanamkan dan diajarkan secara efektif ke dalam jiwa manusia kecuali telah memenuhi persyaratan adab yang diperlukan. Al-Attas memberikan contoh mengenai adab terkait al-Quran, di mana kitab suci tersebut tidak boleh disentuh kecuali setelah melakukan wudhu sebagai persyaratan adab. Contoh lainnya adalah adab dalam dunia pendidikan, di mana setiap peserta didik seharusnya memiliki keyakinan dan kepercayaan terlebih dahulu kepada pendidik yang mereka pilih (Daud, 2003). Inilah esensi sebenarnya dari ilmu pengetahuan.

Benar, pandangan al-Attas mengenai tujuan pendidikan Islam adalah menciptakan manusia yang sempurna (Al-Attas, 2010). Manusia yang memiliki akhlak yang mulia, menguasai ilmu agama dan sains, serta mampu mengaktualisasikan dirinya sebagai hamba Allah dan sebagai khalifah atau wakil Allah di dunia. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa konsep pendidikan berbasis gender dalam pemikiran RA Kartini memiliki relevansi dalam bidang pendidikan karakter dan budi pekerti.

Berdasarkan hasil kajian Relevansi Gender dengan Tujuan Pendidikan Islam Perspektif RA Kartini, terdapat beberapa kesamaan ide antara konsep pendidikan berbasis gender perspektif RA Kartini dengan tujuan pendidikan Islam, antara lain:



Gambar 2. Temua Penelitian

KESIMPULAN

Dalam pemikiran RA Kartini, terdapat dua ide pokok dalam konsep pendidikan berbasis gender. Pertama, pendidikan kesetaraan dimaksudkan untuk mengedepankan keadilan dalam memenuhi hak dan kewajiban antara laki-laki dan perempuan sebagai makhluk Allah SWT. Kedua, pendidikan budi pekerti bertujuan untuk menghasilkan individu yang memiliki moralitas tinggi dan berperan aktif dalam kemajuan bangsa. Tujuan pendidikan Islam berbasis gender juga memiliki relevansi dengan konsep pendidikan berbasis gender RA Kartini. Pertama, manusia dipandang sebagai makhluk yang diciptakan oleh Allah SWT dengan keistimewaan akal untuk berpikir. Konsep kedua adalah pendidikan kesetaraan yang bertujuan untuk memberikan hak dan kewajiban secara merata dan adil kepada semua manusia, tanpa memandang latar belakang sosial dan ekonomi, baik laki-laki maupun perempuan mempunyai kesetaraan hak kemanusiaan. Ketiga, pendidikan budi pekerti sebagai proses pembentukan adab yang baik dan akhlak mulia. Keempat, tujuan pendidikan berbasis gender adalah mendorong laki-laki dan perempuan pergi ke sekolah dengan tujuan untuk memperoleh pengetahuan dan nilai-nilai moral yang memungkinkan mereka bekerja sama dalam upaya mewujudkan kemajuan peradaban melalui penguasaan teknologi dan kemajuan sosial. Dengan demikian, hasil penelitian menunjukkan adanya kesamaan ide antara tujuan pendidikan Islam dengan

konsep pendidikan berbasis gender perspektif RA Kartini. Keduanya menekankan pentingnya pendidikan bagi laki-laki dan perempuan dengan menanamkan pengetahuan serta mencetak akhlak yang baik, sehingga laki-laki dan perempuan dapat bersinergi dalam mengembagka negara.

BIBLIOGRAFI

- Abidin, Z. (2008). Kesetaraan Gender dan Emansipasi Perempuan. 3, 1-18.
- Ahdiat, A. (2022). Indeks Kesenjangan Gender Negara G20 dimana Posisi Indonesia. *Databoks*. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/0>
- Al-Attas, S. M. N. (2010). Islam dan Sekularisme. In K. Muammar (Ed.), *Islam dan Sekularisme*. Institut Pemikiran Islam dan Pembangunan Insan.
- Al-Qazwini, A. M. bin Y., Al-Kattani, A. H., & Mukhlisin, M. (2016). Sunan Ibnu Majah 1/ Abu Abdullah Muhammad bin Yazid Al-Qazwini; penerjemah, Abdul Hayyie al-Kattani, Muhammad Mukhlisin, Andri Wijaya (1st ed.). *Gema Insani Press*. <https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=988577>
- Amanah, N., Andriana, N., Rahman, I. K., Ibn, U., & Bogor, K. (2023). Konsep Kesadaran Gender Dalam Pendidikan Islam : Telaah Buku The Tao Of Islam Karya Sachiko Murata. 34-44.
- Aniroh, Fathurohim, U. S. (2022). Peradaban islam di spanyol dan kontribusinya terhadap Renaissance di eropa. *Jurnal Studi Islam Dan Budaya*, 02(01), 59-69. <https://ejournal.stais.ac.id/index.php/trq>
- Aviyani, A., Jumini, S., & Nugroho, M. Y. A. (2022). Kesetaraan Gender Menurut Tulisan R.A Kartini Dalam Perspektif Pendidikan Islam. *Jurnal Al-Qalam*, 23(2), 54-60.
- Chaerunnisa, L. Y. (2023). Integrasi Pendidikan Berbasis Gender Dengan Ilmu Islam (Studi Kasus di MI Miftahul Akhlaqiyah Bringin Semarang) Integration of Gender-Based Education with Islamic Studies (*Case Study at MI Miftahul Akhlaqiyah Bringin Semarang*). 5 (March), 30-38.
- Daud, W. M. N. (2003). Filsafat dan Praktik Pendidikan Islam (Syed M. Naquib al-Attas).
- Estiana, I. N., Fasa, M. I., & Suharto. (2022). Analisis Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam Pada Masa Nabi Muhammad SAW Sampai Masa Kontemporer. *At-Tauzi: Islamic Economic Journal*, 21 (1), 52-69. <http://jurnalhamfara.ac.id/index.php/attaui/article/view/142%0Ahttps://jurnalhamfara.ac.id/index.php/attaui/article/download/142/158>
- Fakih, M. (2013). Analisis Gender dan Transformasi Sosial (Cetakan Kelima Belas). *Yogyakarta: Pustaka Pelajar*.
- Harisah, A. (2018). Filsafat Pendidikan Islam (1st ed.). *Deepublish*.

- Hartutik. (2015). R.a. kartini : emansipator indonesia awal abad 20. 2(1), 53–54.
- Hermawan, A., Purnomo, B., & Wahyuni, A. (2021). Kesetaraan Gender Pada Abad Xix Di Indonesia Dalam Karya Ra Kartini. *SWADESI: Jurnal Pendidikan Dan Ilmu Sejarah*, 2(1), 50. <https://doi.org/10.26418/swadesi.v2i1.46509>
- Ibnu Majah 220: Iman (Keutamaan Ulama dan Dorongan untuk Menuntut Ilmu). (n.d.).
- Jumyati., Nur'ariyani., S., Hidayat., S., & ratna sari Dewi . (2022). Landasan Yuridis Pendidikan. 4, 8296–8301.
- Kiram, M. Z. (2020). Pendidikan Berbasis Gender Dalam Keluarga Masyarakat Aceh. *Community: Pengawas Dinamika Sosial*, 6 (2), 180. <https://doi.org/10.35308/jcpds.v6i2.2503>
- Los, U. M. D. E. C. D. E. (2016). Ilmu Pendidikan Islam: Menuntun Arah Pendidikan Islam Indonesia (C. Wijaya (Ed.); 1st ed.). LPPPI. <http://repository.uinsu.ac.id/2839/1/Ilmu Pendidikan Islam.pdf>
- Mahjub, A. (1987). Ushul al-Fikr al-Tarbawy fi al-Islam. Muassasah Ulum al-Quran.
- Mayasari, L. D. (2022). 8 Rekomendasi Hasil KUPI II: Mewujudkan Peradaban yang Berkeadilan (T. KUPI (Ed.)). *KUPI*. <https://kupi.or.id/8-rekomendasi-hasil-kupi-ii-mewujudkan-peradaban-yang-berkeadilan/>
- MD, T. A. P., & Hudaidah, H. (2021). Pemikiran Kartini Mengenai Pendidikan Perempuan. *Edukatif: Jurnal Ilmu Pendidikan*, 3(2), 562–568. <https://doi.org/10.31004/edukatif.v3i2.386>
- Miles, M. B. (2014). *Qualitative Data Analysis: a Methods Sourcebook* (H. Salmon (Ed.); 3rd ed.). Sage publications.
- Nainggolan, Yuni Martha, D. (2012). Pengaruh Sikap Kasih Sayang Guru Terhadap Perilaku Siswa Berbudhi Pekerti Dan Hasil Belajar Siswa Di SMA Perintis 2 Bandar Lampung. *Jurnal Penelitian Pendidikan*. <https://media.neliti.com/media/publications/249244-none-837c3dfb.pdf>
- Nurdiansyah, N. M., Arief, A., Hudriyah, H., & Hadawiyah, R. (2021). Model Collaborative Learning Inklusif Gender. *Marwah: Jurnal Perempuan, Agama Dan Jender*, 20(2), 110. <https://doi.org/10.24014/marwah.v20i2.10685>
- Pancaningrum, N. (2023). Persepsi Calon Guru dan Guru Laki-Laki sebagai Minoritas Gender di Pendidikan Anak Usia Dini. 7 (2), 1320–1332. <https://doi.org/10.31004/obsesi.v7i2.3769>
- Permendagri_No. (n.d.).
- Pramudawardhani, I., & Estiana, E. (2019). Perjuangan dan Pemikiran RA Kartini tentang Pendidikan Perempuan. *Keraton: Journal of History Education and Culture*, 1(1), 41–55.

- Qosyasih, N. N. S., Amirullah, A., & Sari, Z. (2023). Hegemoni Maskulinitas: Konstruksi Gender pada Pendidikan Anak Usia Dini. *Jurnal Obsesi: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, 7(1), 479–490. <https://doi.org/10.31004/obsesi.v7i1.3168>
- Quran Kemenag In Ms Word_v2. (n.d.).
- Roqib, M. (2009). Ilmu Pendidikan Islam. *LkiS*.
- Rusydiyah, E. F. (2016). Pendidikan Islam Dan Kesetaraan Gender (Konsepsi Sosial tentang Keadilan Berpendidikan dalam Keluarga). *Jurnal Pendidikan Agama Islam (Journal of Islamic Education Studies)*, 4(1), 20. <https://doi.org/10.15642/pai.2016.4.1.20-43>
- Saeful, A. (2019). Kesetaraan Gender dalam Dunia Pendidikan. *Tarbawi*, 1, 17–30.
- Saihu, S. (2019). Konsep Manusia Dan Implementasinya Dalam Perumusan Tujuan Pendidikan Islam Menurut Murtadha Muthahhari. *Andragogi: Jurnal Pendidikan Islam Dan Manajemen Pendidikan Islam*, 1(2), 197–217. <https://doi.org/10.36671/andragogi.v1i2.54>
- Saputri, D. A. R., Ngazizah, N., & Anjarini, T. (2022). Upaya Peningkatan Kemampuan Kognitif Melalui Pembelajaran Berbasis Gender Sosial Inklusi pada Peserta Didik Kelas V. *Edukatif: Jurnal Ilmu Pendidikan*, 4 (2), 1735–1742. <https://doi.org/10.31004/edukatif.v4i2.2083>
- Statistik, B. P. (2022). *No Title*. Provinsi Jawa Timur. <https://jatim.bps.go.id/subject/28/pendidikan.html#subjekViewTab3>
- Sumayyah Hilyatul A., Fuad Masykur, & Inti Ulfi Sholichah. (2023). Kedudukan Perempuan Dalam Menuntut Ilmu Perspektif Raden Ajeng Kartini Dan Relevansinya Dengan Pendidikan Islam (Kajian Feminisme). *Tarbawi*, 6 (1), 59–77.
- Syarif, S., Suaeb, S., & Akhyar, A. (2023). Kebijakan Pengembangan Mutu Pendidikan Islam dalam Perspektif Manajemen dan Sumber Daya. *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan)*, 7(1), 546–553. <https://doi.org/10.58258/jisip.v7i1.4419>
- Tulillah, T. (2023). Meningkatkan Kinerja Guru Pendidikan Agama Islam Di Smp IT Izzuddin. 02 (04), 373–379.
- Udzma, N. S., Hamid, A., & Herwati, H. (2023). Analisis Ketidakadilan Gender dalam Budaya Patriarki Menurut Karin Van Nieuwkerk dalam Buku *Women Embracing Islam*. *JiIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 6(3), 1709–1716. <https://doi.org/10.54371/jiip.v6i3.1438>
- Umami, R. H. (2020). Relevansi Pembelajaran Pendidikan Agama Islam Berbasis Pengarusutamaan Gender. *Journal of Islamic Education Policy*, 4(1), 29–39. <https://doi.org/10.30984/jiep.v4i1.1271>

- Undang Undang RI. (n.d.-a). UU RI No. 20 Pasal 4 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Undang Undang RI. (n.d.-b). UU RI No. 34 Pasal 48 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.
- Undang Undang RI. (n.d.-c). UU RI No. 34 Pasal 60 Ayat 1 Tentang Hak Asasi Manusia.
- UU RI No. 10 tentang Partai Politik. (n.d.). *DPR RI*. <https://www.dpr.go.id>
- Wahyuni, Z. M., Lestari, F., & Hasanah, U. (2020). Kepemimpinan Dan Gender Dalam Lembaga Pendidikan Islam. *PRODU: Prokurasi Edukasi Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 2(1), 26–37. <https://doi.org/10.15548/p-prokurasi.v2i1.2246>
- Yumnah, S. (2021). Pemikiran Fatima Mernissi tentang Pendidikan. *Jurnal Pendidikan Islam*, 10 (1), 24–41. <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>
- Zaini, A., Despite, A., & Madjid, N. (n.d.). Politik Etis dan Implikasinya Terhadap Dualisme Sistem Pendidikan di Indonesia.